

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sampel dan Data Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2009). Penelitian ini menggunakan populasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, yaitu Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten. Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung adalah sebanyak 15 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 2 (Dua) pemerintah kota, dan 13 pemerintah kabupaten, Berikut adalah seluruh Populasi penelitian ini :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Kabupaten Lampung Barat | 9. Kabupaten Tanggamus |
| 2. Kabupaten Lampung Selatan | 10. Kabupaten Tulang Bawang |
| 3. Kabupaten Lampung Tengah | 11. Kabupaten Tulang Bawang Barat |
| 4. Kabupaten Lampung Timur | 12. Kabupaten Way Kanan |
| 5. Kabupaten Lampung Utara | 13. Kota Bandar Lampung |
| 6. Kabupaten Mesuji | 14. Kota Metro |
| 7. Kabupaten Pesawaran | 15. Kabupaten Pesisir Barat |
| 8. Kabupaten Pringsewu | |

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2005). Teknik pengambilan sampel (*sampling*) dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel dengan pertimbangan (*judgment purposive sampling*), yaitu tipe pemilihan sampel tidak secara acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dan umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang telah menyusun laporan keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.
2. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang mempunyai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 telah dipublikasikan melalui *website* resmi BPS.

3.2 Operasional Variabel Penelitian

Kinerja keuangan pemda adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui Kinerja keuangan Daerah

seluruh Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi Lampung maka rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas, serta Rasio Aktivitas.

(Halim, 2007):

1. Rasio Kemandirian

Kemandirian Keuangan Daerah adalah menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan (Halim, 2007).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio kemandirian tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio kemandirian yang ada.

Tabel 3.1 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kriteria Kemandirian	Persentase Kemandiran (%)
Sangat Baik	>50
Baik	40 – 50
Cukup	30 – 40
Sedang	20 – 30
Kurang	10-20
Sangat Kurang	0-10

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam Nurhayani 2010

2. Rasio Efektifitas

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah.

Tabel 3.2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	60

Sumber : Mahmudi (2011:171)

3. Rasio Aktivitas

Aktivitas Keuangan Daerah adalah bagaimana pemda memperoleh dan membelanjakan pendapatan daerahnya. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang

dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim, 2007):

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Belanja Daerah}}$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah dinegara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio aktivitas daerah yang relative masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan didaerah.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif , dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan deskriptif atau variabel-variabel penelitian. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi umum dari variabel penelitian mengenai nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, sum. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.